

Theory And Concept Of Business Ethic In International Relations Studies

Dedik Fitra S, Praja Firdaus, Rendy Gege, Trisfani

*Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional
FISIP, Universitas Airlangga*

e-mail: dedy.col@gmail.com

ABSTRACT

In the discourse of business and global corporations, the study of ethics in business and global corporations are rarely found. Hence, this paper will discuss the ethics in business and global corporations. This paper firstly examines the theories and conceptual backgrounds of ethics in the discipline of International Relations. Then the paper starts to discuss the business ethics in terms of international political economy. Authors found that the discourse of ethics in business and global corporations could be examined through three paths. They are ethics and CSR, ethics and global governance, and also ethics and the new millennium. Last, the paper concludes that business ethics are important. They are vital because the operations and the behaviors of the global corporations reflect their business and economical interests.

Keywords: *The Ethics, Business and Global Corporations, International Political Economy, CSR, Global Governance, and The New Milenium.*

Dalam wacana bisnis dan perusahaan global, jarang ditemukan studi tentang etika dalam bisnis dan perusahaan global. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas etika dalam bisnis dan perusahaan global. Pertama, penelitian ini meneliti teori dan latar belakang konseptual dari etika dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai etika bisnis dalam ekonomi politik internasional. Penulis mendapati bahwa wacana etika dalam bisnis dan perusahaan global dapat dikaji melalui tiga hal, antara lain etika dan CSR, etika dan pemerintahan global, serta etika dan era milenium baru. Terakhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bisnis merupakan hal yang penting. Hal tersebut dianggap penting karena operasi dan perilaku dari perusahaan global mencerminkan bisnis mereka dan kepentingan ekonomis.

Kata Kunci: *Etika, Bisnis dan Perusahaan Global, Ekonomi Politik Internasional, CSR, Pemerintahan Global, dan Era Milenium Baru.*

Ide dasar dari etika bisnis dalam aktivitas bisnis dan ekonomi adalah membawa aktivitas ekonomi tidak hanya berbicara mengenai mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin tetapi juga agar kegiatan bisnis menghasilkan hidup yang lebih baik. Etika bisnis membantu untuk membedakan antara moral, tanggung jawab dan keadilan (Dricklova dan Kaputa, 2006). Etika bisnis adalah penerapan etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah penerapan gagasan etika secara umum dalam perilaku bisnis.

Perilaku etika bisnis memfasilitasi dan mempromosikan kebaikan kepada masyarakat, meningkatkan profitabilitas, memelihara hubungan bisnis dan meningkatkan

produktivitas karyawan. Konsep etika bisnis datang dengan berbagai macam konsep untuk berbagai macam orang didalamnya, namun pada umumnya etika bisnis berfungsi untuk mengetahui apa yang benar atau salah di tempat kerja dan melakukan hal yang benar ini dalam hal efek produk, jasa dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Etika bisnis berkaitan dengan perilaku pengusaha dalam melakukan bisnis. Praktik yang tidak etis menciptakan masalah untuk pengusaha dan bisnis itu sendiri. Hidup dan pertumbuhan unit usaha tergantung pada etika yang dilakukan oleh pengusaha. Etika bisnis dibangun selaras dengan waktu dan adat yang ada di wilayah bisnis tersebut. Sebuah kebiasaan akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Jika kebiasaan ini diadopsi dan diterima oleh pengusaha dan masyarakat, adat yang akan menjadi etika. Etika bisnis ini berlaku untuk setiap jenis usaha. Tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan membutuhkan pengamatan terhadap etika bisnis (Baijumon, 2011).

Lebih lanjut setidaknya ada beberapa alasan mengapa seorang mahasiswa Hubungan Internasional (HI) juga harus mempelajari Etika Bisnis, terutama dalam kajian Korporasi Global. Hal tersebut antara lain: Pertama, pengaruh dan kekuatan perusahaan global di masyarakat saat ini sudah semakin besar. Dengan mempelajari etika bisnis, akan membantu kita untuk memahami secara mendalam apa yang menyebabkan hal ini terjadi, apa implikasi yang mungkin terjadi, dan bagaimana kita mengatasi situasi ini; Kedua, Korporasi Global memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat, seperti dalam hal hasil produk dan jasa yang diinginkan, menyediakan lapangan kerja, membayar pajak, dan bertindak sebagai pendorong pembangunan ekonomi; ketiga, malpraktek bisnis pada sebuah korporasi memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian yang sangat besar pada individu, masyarakat dan lingkungan. Melalui etika bisnis, kita dibantu untuk memahami lebih lanjut tentang penyebab dan konsekuensi dari malpraktek ini, etika bisnis membantu menciptakan rasa saling percaya dan kepercayaan dalam hubungan; keempat, tuntutan ditempatkan pada bisnis etis oleh berbagai pemangku kepentingan terus-menerus menjadi lebih kompleks dan lebih menantang. Etika bisnis menyediakan sarana untuk menghargai dan memahami tantangan lebih jelas, agar perusahaan dapat memenuhi harapan etis yang lebih efektif; kelima, Etika bisnis dapat memberikan kemampuan untuk menilai manfaat dan masalah yang terkait dengan cara yang berbeda untuk mengelola etika dalam organisasi dalam lingkup global.

Di dalam studi politik dunia tidak dapat terlepas dari berbagai isu internasional yang kian meluas, sehingga pembahasan kajian dalam isu – isu tersebut menjadi penting dalam studi hubungan internasional. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah Korporasi global. Selama ini dipahami perusahaan global memiliki andil penting dalam perkembangan hubungan internasional yang mana dipahami bahwa korporasi global merupakan aktor dalam hubungan internasional seperti halnya NGO, LSM dan *Civil Society*. Jika melihat lebih dalam aktor – aktor dalam hubungan internasional tersebut menjadi penting dari apa yang telah diperdebatkan bahwa korporasi bukan hanya dapat mempengaruhi pasar namun juga perpolitikan baik negara maupun politik internasional. Hubungan internasional yang bersifat multidisiplin ini memberikan warna baru terhadap perdebatan isu – isu yang muncul di wilayah internasional, pengembangan atau ekspansi perusahaan transnasional memberikan warna baru bagi studi hubungan internasional sangat berbeda ketika melihat studi hubungan internasional yang dahulu kaku *state centric* peran aktor tunggal “Negara” menjadi keputusan akhir dalam sebuah kebijakan.

Dominasi paradigma HI lama yang cenderung mengesampingkan etika didalam politik internasional menegaskan bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam hubungan internasional khususnya perilaku aktor non-negara yaitu framework negara dan sistem internasional yang anarki (Ashley, 1987). Setelah perang dunia kedua sistem internasional menjadi rujukan bawh negara – negara utama “Barat” dan negara “Baru” sama – sama memiliki andil untuk meniptakan perdamaian dunia namun hal tersebut seolah bias, penggunaan power bukan lagi *hard power* namun lebih ke *soft power* untuk menunjukkan kekuatan mereka di wilayah internasional yaitu melalui ekspansi perusahaan nasional ke lintas batas negara. Ambisi terhadap kekuasaan dan legitimasi masih terlihat kuat dan bahkan lebih kuat efek dari pada penggunaan hard power untuk menguasai pasar dan negara, dapat dilihat ekspansi ekonomi China, Jepang, Amerika Serikat dan negara Eropa dalam hal keuangan.

Korporasi global memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi politik internasional yang secara tidak langsung mengikutkan negara dan pasar dalam sistem anarki. Korporasi berkembang dengan cepat setelah perang dunia ke dua dan regime neo liberal dalam dunia internasional memberi sumbangan penuh bagi proses terciptanya globalisasi yang syarat akan integrasi, hal ini sangat jelas bahwa korporasi gobal sebagai aktor non-negara memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkup internasional. Persoalan meluasnya korporasi global ini perlu ditanggapi serius bahwa dalam hubungan internasional selama ini belum memiliki andil dalam memephatikan dampak dari luasnya ekspansi korporasi global sebagai kekuatan ekonomi global lebih dari negara. Mungkin didalam perkembanganya korprorasi gobal memiliki dampak dan regulasi dibuat dengan memperhatikan kondisi lokal seperti CSR namun hal ini tidak menutup bahwa peranan tersebut hanya bersifat formalitas yang dibuat oleh perusahaan. Ada hubungan antara negara dan perusahaan untuk membuat sebuah regulasi terhadap perilaku perusahaan transnasional dan memerlukan dukungan dari negara dunia berikut negara asal perusahaan untuk ikut andil dalam menciptakan aturan terhadap perilaku perusahaan – perusahaan transnasional tersebut yaitu dengan etika.

Menarik kemudian untuk di kaji lebih dalam, aplikasi operasional perusahaan global di negara – negara tujuan. Karena melihat kembali peranan perusahaan global yang relatif menimbulkan dampak buruk dan baik bagi ekonomi maupun lingkungan yang efeknya tertuju pada masyarakat khususnya.

Diskursus Etika Bisnis dalam Ekonomi Politik Internasional

Dalam studi ilmu ekonomi bisnis dengan merujuk pada pemahaman Manuel G Velasques (2005), bahwa etika berkaitan dengan moral hal melihat pada benar dan salah, meski pandangan Velasqes terlihat Normatif studi etika dalam berbisnis Velasqes dimana perlu dalam hubungan pasar “bisnis” yaitu tentang kebijakan dalam kaitan konsentrasi standart sebuah institusi dan perilaku bisnis. Sebagaimana yang dilihat oleh Velasqes diatas senada dengan pemikiran Yosephus (2010), bahwa etika bisnis merupakan etika terapan “*Applied Ethic*” dimana etik bisnis merupakan wilayah terapan dari prnsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia dalam ekonomi khususnya berbisnis. Melihat kembalai definisi yang diberikan para scholar dalam bisnis tersebut, dapat dipahami dan dikaitkan dalam kajian hubungan internasional saat ini yang demikian luas cakupan persoalan politik ekonomi inernasional, demikian juga perkembangan aktor non-negara seperti hadirnya MNC sampai dengan NGO yang banyak mempunyai pengaruh besar dalam hubungan internasional baik secara formal maupun non-formal maksudnya adalah dalam tahapan diplomatis atau kerjasam kerja.

Menurut pengertian tersebut jelas bahwa peranan dalam ruang lingkup hubungan internasional etika bisnis menjadi penting untuk dijadikan sebagai salah satu pendukung bahan mata ajar korporasi global karena hal etika bisnis secara tidak langsung berbicara pada ranah aktor yang bermain didalamnya yaitu perusahaan dan aktor bisnis.

Von der Embse dan R.A Wanglely dalam artikel “*Advance Management Jurnal* (1988)” memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan perilaku etika bisnis, pertama *Utilitarian approach*, pendekatan ini mengarah pada tindakan yang mendasarkan pada konsekwensi, artinya segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus mengikuti cara – cara yang dapat memberi manfaat sebesar- besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dengan biaya serendah rendahnya. Yang kedua *Individual right approach*, dimana setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati, namun tindakan ataupun langkah tersebut harus dihindari ketika akan berbenturan dengan oranglain. *ketiga Justice approach*, para pembuat keputusan mempunyai hak yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan maupun kelompok. Dari ketiga etika bisnis tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa etika merupakan aspek penting dalam ekonomi politik internasional karena pelaku bisnis atau aktor dalam era globalisasi telah bertransformasi secara sistematis dalam operasional mereka di lintas negara, sehingga hal ini menimbulkan kegelisahan bagi berbagai kalangan terutama negara dan masyarakat yang terlibat langsung dalam perkembangan ekonomi internasional. Persoalan tersebut secara jelas membawa pengaruh bagi negara – negara berkembang sebagai negara terdampak meski dalam hal tersebut ada organisasi internasional seperti WTO kemudian hadirnya OECD sebagai lembaga internasional yang beranggotakan negara maju yang dimaksudkan untuk memberi arahan dan pedoman bagi perusahaan transnasional mereka yang beroperasi di negara berkembang, belum tentu menjadi rujukan karena perilaku bisnis secara sistematis juga bukan hanya dalam ranah bisnis tetapi mengikutkan persepsi negosiasi politik dengan pemerintah terkait sehingga dapat di definisikan persoalan dalam etika bisnis yaitu: 1) Sistematis yaitu masalah – masalah etika dalam pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum dan sistem sosial dimana bisnis beroperasi; 2) Korporasi menjadi masalah ketika dalam perusahaan bisnis tertentu, timbul pertanyaan – pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasi internasional, perusahaan individual sebagai keseluruhan dalam rantai bisnis; 3) Individu menjadi permasalahan dalam etika bisnis ketika timbul pertanyaan individual dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.

Ada dua pandangan dasar dalam melihat etika bisnis yaitu sistem bisnis harus terencana dan sistem bisnis harus menjadi sistem pasar bebas. Beberapa pandangan tersebut terlihat pada pemahaman John Locke (1632-1704) dan Adam Smith (1723-1790) dalam Pasar bebas dimana individu dalam lingkup kebebasan dapat melakukan bisnis semau mereka dan hal ini memungkinkan akan bertabrakan tentang hak masing – masing, kebebasan dari batas – batas alamiah yang mereka alami harus bebas dari campur tangan pemerintah yang dentik dengan batasan, persoalan kebebasan dan hak atas properti menjadi acuan utama pandangan Locke. Hal tersebut berbeda dengan pandangan Smith, bah individu bebas mencari kepentingan sendiri dengan adanya pasar bebas, dua kondisi pandangan yang saling bertolak belakang ini menjadi persoalan dalam etika berbisnis dalam dinamika ekonomi dan politik internasional. Kemudian kritik John Mynard Keynes (1883-1946) terhadap pasar bebas dari Adam Smith dengan kepercayaan *invisible hand-nya* Keynes memandang bahwa tanpa kehadiran pemerintah dalam pasar permintaan barang tidak akan bisa cukup untuk

menyerap persediaan yang ada, dengan adanya intervensi pemerintah dapat menjadi pencegahan pengehamatan yang berlebihan dengan mempengaruhi suku bunga dengan mengatur kurs mata uang meskipun begitu kritik Keynes ini menjadi kurang relevan ketika terjadi *stagnasi* pada tahun 1970an. Hal tersebut juga nampak pada kritik terhadap pasar bebas Karl Marx (1818-1983) yang melihat pada dampak Kapitalisme global yang akan menggiring manusia terdiktomi oleh kelas sosial dan memaksa individu untuk melangkah pada ancaman konsumerisme di negara berkembang khususnya. Sebagaimana penjabaran tersebut menurut penulis, bahwa etika bisnis memiliki andil dalam mata kuliah korporasi global dimana fokus utama adalah perusahaan sebagai aktor non-negara yang juga ikut bermain dalam dinamika internasional.

Etika Bisnis dalam korporasi Global

Ada banyak pintu bagi etika bisnis untuk masuk dalam ranah kajian Ilmu Hubungan Internasional. Pintu pertama datang dari Carl McDaniels dan Lawrence J. Gitman yang menghubungkan etika bisnis dengan perkembangan CSR (*corporate social responsibility*). Pintu kedua disediakan oleh bahasan Susanne Soederberg yang mampu menjelaskan bagaimana etika bisnis yang diimplementasikan dalam CSR berhubungan dengan *global governance*. Pintu ketiga dibuka oleh Judith Irwin yang menghubungkan bisnis Cina dan bagaimana Cina merespon perkembangan etika bisnis termutakhir. Pintu keempat, pintu terakhir, akan menghubungkan bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang ada dalam hubungan internasional yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan etika bisnis itu sendiri.

Pintu Pertama: Etika Bisnis dan CSR

Dewasa ini, kalangan bisnis seakan semakin memiliki kesadaran akan pentingnya etika bisnis dalam bisnis ataupun perdagangan internasional. Dalam perkembangannya, Lawrence dan Gitman mengatakan bahwa etika bisnis tidak lagi menjadi beban yang terpaksa harus dilaksanakan perusahaan melainkan sudah menjadi salah satu strategi pengembangan perusahaan skala internasional. Contoh nyata akan manfaat etika bisnis sebagai strategi pengembangan perusahaan misalnya adalah *corporate social responsibility* atau CSR. Pada umumnya, implementasi dari etika bisnis yang berkembang sekarang ini diwujudkan dalam bentuk CSR, yaitu suatu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi (McDaniels & Lawrence, t.t).

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Pengertian CSR sangat beragam. Pada dasarnya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering

digunakan adalah *golden rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan (McDaniels & Lawrence, t.t). Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

CSR kini semakin berkembang dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis (McDaniels & Lawrence, t.t).. Pendapat Milton Friedman yang menyatakan bahwa tujuan utama korporasi adalah memperoleh profit semata, semakin ditinggalkan. Sebaliknya, konsep *triple bottom line (profit, planet, people)* yang digagas John Elkington semakin masuk ke mainstream etika bisnis (Suharto, 2007). Beragam cara dilakukan perusahaan untuk menjalankan CSR. Ada perusahaan yang melaksanakan CSR sendiri, mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Ada pula perusahaan yang mendirikan yayasan, bermitra dengan pihak lain atau bergabung dalam konsorsium.

Pintu Kedua: Etika Bisnis, Global Governance, dan Global CSR

Di tingkat global masih belum ada definisi konkret dan jelas mengenai implementasi etika bisnis. Oleh karenanya belum ada pula definisi yang solid mengenai CSR. Konsulat Bisnis Dunia mendefinisikan CSR sebagai

“relationship between corporations and stakeholders, such as employees, the wider community, suppliers, creditors, shareholders, the environment, and so on, in which there is a ‘commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large” (Soederberg, 2006)

Sedangkan Komunitas Oxfam mempunyai definisi yang lebih komprehensif yang mana tidak hanya membahas bagian apa saja yang ada dalam konteks CSR namun bagaimana bagian-bagian tersebut dijalankan dalam kerangka CSR (Soederberg, 2006). TNC dengan CSR-nya kemudian menjadi agen dari kapitalisme global yang bersifat emosional, disebut juga sebagai *soulful corporations*. Penjelmaan TNC ke dalam *soulful corporations* inilah yang kemudian menginsersikan nilai-nilai etika bisnis yang kemudian diturunkan melalui CSR. Sebagai *soulful corporations* sudah menjadi tugas utama dari perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Misi emosional yang diemban oleh TNC, sekiranya normatif, namun dalam implementasinya masih banyak yang berindikasi ekonomis. Untuk mengakomodasi etika bisnis dalam misi emosional tersebut maka dibentuklah instrumen mekanisme kerja TNC di negara-negara dunia ketiga, yaitu 1) *the Code* dan 2) *Global Compact*.

United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) pada tahun 1974 merumuskan sebuah *code of conduct* bagi TNC yang beroperasi di negara dunia ketiga. Rumusan ini kemudian diberi nama *the Code*. *The Code* adalah hasil dari perjuangan negara-negara berkembang yang berjuang demi terlaksananya *fair trade*, karena selama ini perdagangan internasional hanya dipegang oleh negara-negara maju. Perjuangan ini juga terbantu oleh konsiderasi Raul Prebisch yang merumuskan dependensi tingkat global karena adanya ketimpangan teknologi dan informasi antara negara maju dan berkembang (Soederberg, 2006). *The Code* sebagai instrumen

pelaksana CSR diperjuangkan untuk menjembatani antara kepentingan kapital TNC dan kebijakan etika-sosial pemerintah. Oleh karena itu salah satu penekanan dalam *the Code* adalah pentingnya intervensi negara dalam perdagangan TNC.

Intervensi negara seringkali diaplikasikan dalam hal manajemen investasi asing atau FDI. Dalam penanaman investasi asing TNC punya dua pilihan, yaitu membeli saham perusahaan lokal atau membuat perusahaan sendiri (Soederberg, 2006). Arus investasi luar negeri (FDI) biasanya kemudian juga memunculkan arus merger dan akuisisi perusahaan. Masih juga muncul hambatan yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga dalam menselaraskan TNC dan lingkungan. Ketika negara mengandalkan pajak, maka TNC melakukan *transfer pricing* yang kemudian meminimalisir beban pajak yang ditanggung dan memperbesar probabilitas keuntungan perusahaan. Ditambah dengan pemberhentian bantuan dana dari negara-negara maju setelah Perang Dingin berakhir, negara berkembang seakan sulit untuk hidup dan melakukan pembangunan. Dana bantuan ekonomi hanya terpusat pada beberapa negara, seperti Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara yang kemudian masuk dalam kategori NIC (*Newly Industrialized Country*). FDI, namun demikian, merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara dunia ketiga. Oleh karena itu terjadi dialektik kelas antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Di satu sisi negara membutuhkan investasi, namun masuknya investasi bisa jadi memperparah arus modal kapital TNC ke dalam negeri. Oleh karena kontradiksi sistemik, *the Code* sendiri mulai kehilangan respek dari negara dunia ketiga.

Global Compact(GC), berbeda dari *the Code*, adalah instrumen CSR yang dibentuk oleh PBB dengan asumsi sebagai *global-network learning* yang melibatkan tidak hanya negara, namun juga TNC global dan NGO (*non-governmental organization*). Jauh dari tujuan responsibilitas dan sangat berjarak dari etika bisnis yang ada, GC adalah jawaban negara maju dan TNC dalam menyerap semua gerakan yang melawan koersi ekonomi (investasi dan utang luar negeri) yang dilakukan oleh TNC dan negara maju di negara dunia ketiga. GC juga merupakan jalan keluar bagi TNC untuk terus berekspansi dengan menjawab tiga tantangan, yaitu 1) standardisasi perilaku perusahaan yang dibutuhkan untuk memperbaiki citra TNC di masyarakat, 2) adanya mekanisme *reward and bonus* untuk dimasukkan dalam standardisasi, 3) dan bantuan institusional dalam standardisasi melalui WTO dan PBB (Soederberg, 2006).

GC memiliki ciri khusus yang berbeda dengan *the Code* dimana GC tidak menekankan pada intervensi negara. GC kemudian mengalihkan perhatian pada mekanisme *self-regulatory*, artinya bahwa pelibatan banyak aktor dalam GC adalah untuk memancing *good development* dari CSR dan TNC. Oleh sebabnya, TNC sangat membutuhkan citra positif. Dengan didukung oleh WTO, IMF, dan Bank Dunia, serta tentu saja PBB, TNC menikmati advokasi yang kembali menempatkan negara dunia ketiga pada pihak yang tidak berkeuntungan. Dengan mekanisme *self-regulatory* maka GC memberi TNC dua keuntungan utama, yaitu 1) depolitisasi dan minimalisasi *counter-hegemonic movement* yang dilakukan NGO dan masyarakat negara dunia ketiga hanya sebatas pada interaksi dunia maya, dan 2) GC telah memprivatisasi tanggung jawab ekonomi sosial dan mengalihkannya dari beban negara-negara maju. Semakin kentara, GC bukannya memberi dialog konstruktif antara TNC, negara, dan NGO, namun hanya sekedar legitimasi institusional bagi strategi restrukturisasi neo-liberal kapitalisme global (Soederberg, 2006).

Tampak jelas kemudian, bagi Soederberg yang memahami dunia dalam perspektif Gramscian, bahwa globalisasi yang kemudian diturunkan menjadi pemerintahan global (organisasi internasional) adalah agen dari neo-liberal kapitalisme. Pemerintahan global yang mendukung CSR sebagai taktik dalam pencapaian restrukturisasi

kapitalisme ini telah menghasilkan sedikitnya dua instrumen mekanisme CSR yang menguntungkan bagi TNC. TNC kemudian tidak perlu cemas dalam menghadapi dilema *falling rate of profit*. Globalisasi, yang dipercaya sebagai keniscayaan oleh Kofi Annan, telah membentuk dikotomi baru dalam konstelasi internasional, yaitu negara borjuis dan negara proletar. Tanpa adanya etika bisnis yang diakomodasi baik oleh *the Code* maupun oleh GC, maka jurang struktur borjuis dan proletar dalam skala negara tersebut akan menjadi semakin tinggi.

Pintu Ketiga: Etika Bisnis Cina dan Tantangannya

Bagi masyarakat Cina, bisnis dan Konfusianisme merupakan dua hal yang masih saling erat melekat. Masyarakat Cina masih banyak menggunakan Konfusianisme sebagai pedoman dalam kehidupan sosial maupun untuk praktek bisnis atau perdagangan. Konfusianisme sendiri bisa dipahami secara sederhana sebagai norma dan nilai kehidupan yang menjunjung tinggi harmonisasi dan integrasi dengan lingkungan alam sekitar. Konfusianisme juga mengajarkan tentang *guanxi* dan *mianzi*. *Guanxi* dan *mianzi* merupakan ajaran moral yang diambil dari Konfusianisme yang banyak diterapkan masyarakat Cina dalam bisnis mereka sehari-hari (Irwin, 2012). *Guanxi* sendiri berarti koneksi personal, yakni skala dan intensitas hubungan sosial seseorang dengan orang lain yang sifatnya lebih pada personal ketimbang profesional. *Guanxi* adalah alasan pertama mengapa Cina dapat begitu sukses dengan diaspora Cina yang menyebar ke banyak negara. Sedangkan *mianzi* adalah ajaran Konfusianisme yang mengajarkan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Oleh karenanya, jarak pemisah interaksi antar generasi dalam masyarakat Cina masih tinggi.

Judith Irwin kemudian mencoba untuk mengukur aspek etika yang diturunkan dari Konfusianisme dengan dimensi kultural dari nasionalisme, yakni 1) kesenjangan kekuasaan, 2) individualisme, 3) maskulinitas, 4) tendensi ketidakpastian, dan 5) orientasi jangka panjang. Hasil yang didapat oleh Judith dari pengukuran tersebut memberikan sketsa kasar bagaimana etika berbisnis di Cina memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri untuk menghadapi dinamika bisnis internasional ke depan. Pertama, kesenjangan kekuasaan di Cina adalah tinggi, yang mana berarti masyarakat Cina masih memandang bahwa struktur (stratifikasi kelas ekonomi dan politik) adalah nyata dan sangat jauh jarak diantaranya. Hal ini yang kemudian menjelaskan signifikansi dari *mianzi*, yang mana masyarakat Cina akan memandang orang yang memiliki jabatan dan akan saling menjaga respek kepada sesama. Kedua, Cina dipandang memiliki tingkat individualisme yang rendah. Artinya bahwa masyarakat Cina sangat kolektif dan kebanyakan dari mereka digerakkan oleh kepentingan jangka panjang yang sama. Ketiga, Cina juga digerakkan oleh nilai-nilai yang dipandang sebagai simbol maskulinitas, seperti kompetisi dan penghargaan atas kesuksesan. Keempat, Cina adalah negara dengan masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk bertindak dan mengambil kebijakan yang kurang mempunyai presisi. Dengan kata lain, Cina memiliki kultur untuk membuat banyak hal menjadi kurang ada batasannya, tendensi ketidakpastian yang tinggi. Masyarakat Cina kemudian lebih mementingkan aktualisasi kondisi dan situasi dalam pengambilan keputusan daripada patuh dan taat kepada aturan yang berlaku saat itu. Kelima, sudah menjadi rahasia umum bahwa Cina adalah bangsa dengan orientasi jangka panjang yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari budaya para karyawan Cina yang bekerja dengan harapan akan tujuan jangka panjang (Irwin, 2012).

Hal yang dapat dipelajari dari apa yang diteliti oleh Judith Irwin adalah etika bisnis Cina masih menyerap dan membawa nilai-nilai Konfusianisme di dalamnya dengan *guanxi* (kedekatan personal) dan *mianzi* (kehormatan dan harga diri) yang menjadi nilai ajaran utama. Dari situ, Cina kemudian menjadi komunitas yang lebih dekat kepada masyarakat dengan etos kerja yang tinggi namun masih menganggap penting aspek politis dari praktek bisnis mereka. Tantangan yang sekiranya akan dihadapi oleh Cina dalam konteks etika bisnis ke depan adalah perihal kemanusiaan. Kebebasan dan hak asasi manusia masih akan menjadi isu sentral dalam etika bisnis Cina. Dalam beberapa tahun terakhir telah mulai banyak muncul gerakan-gerakan dari *civil society* yang mengangkat isu kemanusiaan. Tantangan yang kedua adalah korupsi, yang mana Cina masih memiliki *track record* yang kurang baik mengenai hal ini. Tantangan ketiga adalah gabungan dari diskriminasi dan degradasi lingkungan. Memang isu diskriminasi dan degradasi lingkungan menjadi semakin berkembang seiring dengan pesatnya perindustrian Cina. Inilah tantangan terbesar Cina jika dikaitkan dengan CSR sebagai bentuk implementasi riil dari etika bisnis Cina.

Pintu Keempat: Tantangan Etika Bisnis Millennium Baru

Etika dalam bisnis terkadang terkandung dalam hal-hal kecil yang seringkali ditinggalkan dalam pembahasan etika bisnis dan ekonomi, yakni hipokrisi (Toffler, 2001). Dalam bisnis hipokrisi dapat menjelma dalam bentuk yang beragam, mulai dari bagaimana rencana bisnis dirancang hingga bagaimana laporan pertanggungjawaban finansial sebuah bisnis tersebut dipertanggungjawabkan. Oleh sebabnya, hipokrisi menjadi salah satu tantangan utama dalam etika bisnis menyambut *millennium* baru ini. Bisnis yang memang berorientasi keuntungan (*profit*) selalu mengundang pelaku bisnis untuk menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Hal ini juga yang kemudian menimbulkan beberapa krisis dunia. Walau memang mayoritas dari krisis dunia dikategorikan sebagai krisis moneter, namun satu hal yang dilupakan adalah moneter internasional digerakkan pula oleh *international cashflow*. Sehingga bisnis internasional, dengan berbagai hipokrisinya, juga menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi dunia.

Krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh menarik bagaimana hipokrisi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya krisis. Krisis 2008, atau yang dikenal dengan *subprime mortgage*, terjadi karena dijalankannya bisnis melalui skema Ponzi. Skema Ponzi sendiri adalah skema bisnis dengan mengandalkan banyaknya pelanggan/konsumen tanpa menghiraukan banyaknya cadangan modal (*capital*). Skema Ponzi memiliki dua konsep yang sangat populer, yakni *downline* dan *upline*. Dengan masyarakat kelas menengah yang sedang menikmati surplus finansial, maka masyarakat kelas menengah Amerika Serikat meningkat daya belinya (*purchasing power parity*). Namun, daya beli masyarakat kelas menengah tidak dibarengi dengan ketersediaan kapital secara riil. Lalu, masyarakat kelas menengah tersebut mengalami kredit gagal. Kredit gagal tersebut terjadi karena skema Ponzi menjadikan hipokrisi sebagai katalisator utama Bergeraknya sebuah bisnis. Tidak salah kemudian jika krisis moneter akhirnya muncul dan membuat rugi beberapa perusahaan asuransi terbesar dunia di Amerika Serikat.

Tantangan kedua adalah pertanggungjawaban dalam hal teknologi (Toffler, 2001). Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sudah semakin pesat majunya. Teknologi selalu membawa dua dampak, positif dan negatif. Oleh karenanya dalam etika bisnis, jika dikontekstualisasikan dengan perkembangan teknologi, bisnis pun dapat mempunyai dampak positif dan negatif. Volatilitas sebuah bisnis kemudian lebih tinggi dan mudah

berubah. Siapa yang menyangka bahwa Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates tidak bisa menguasai pasar *software* karena tumbuhnya Google akhir-akhir ini? Cerita Research in Motion dengan produknya yang bernama Blackberry yang sekarang tenggelam karena diungguli oleh Samsung juga menjadi sebuah contoh nyata bahwa teknologi dan etika bisnis menjadi sangat biner dan kecepatan perubahannya tinggi sekali. Berkembangnya Google dan Samsung dari satu sisi merupakan dampak positif dari maju pesatnya sebuah kecanggihan teknologi. Namun hal tersebut juga menjadi dampak negatif dalam persaingan industri telekomunikasi dan informasi.

Bisnis dan teknologi pun kerap menjadi lahan perbuatan buruk terhadap masyarakat. Semakin maraknya bisnis non-riil dengan transaksinya yang non-riil pula berdampak pada tingginya *cybercrime* yang dilakukan oleh masyarakat yang melek teknologi. Dalam konteks etika bisnis dan teknologi, hal tersebut jelas sekali menggambarkan bagaimana masyarakat meninggalkan etika dan hanya berpijak pada keuntungan semata. Parahnya adalah *cybercrime* tidak hanya dilakukan dengan skala local, namun juga dipraktekkan dalam skala internasional, contohnya adalah penyerangan akun seorang nasabah bank nasional Indonesia oleh orang asing beberapa waktu yang lalu. Banyak pula contoh kasus penipuan baik yang melalui telepon seluler (*cellphone*) maupun melalui situs belanja *online*.

Aplikasi Etika Bisnis dalam Perilaku Korporasi Global

Tidak dapat dipungkiri bahwa etika bisnis merupakan hal krusial yang harus diaplikasikan dalam korporasi global. Etika bisnis dapat membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (*value-creation*) yang tinggi. Etika bisnis dapat digunakan sebagai landasan yang kokoh dalam perwujudannya. Aplikasi tersebut dapat dilihat melalui implementasi etika bisnis dalam penyelenggaraan bisnis korporasi global dimana etika bisnis yang dijalankan tersebut mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya masing-masing. Dengan kata lain etika tersebut mengikat seluruh elemen dalam sebuah korporasi mulai dari manajer, pimpinan unit kerja dan kelembagaan perusahaan. Semua elemen tersebut harus mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokoknya sekaligus melaksanakan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.

Dalam pandangan sempit perusahaan dianggap sudah melaksanakan etika bisnis bilamana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara lain adalah: 1) Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain; 2) Indikator Etika Bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya; 3) Indikator Etika Bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya; 4) Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya; 5) Indikator Etika Bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun

kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa; 6) Indikator Etika Bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

Sebenarnya terdapat banyak sekali aplikasi contoh atau bentuk nyata dari pengaplikasian etika bisnis dalam korporasi global. Sejauh konsep dan indikator etika bisnis terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa suatu korporasi telah mengaplikasikan etika bisnis dalam operasional bisnisnya. Di Indonesia, praktek penerapan etika bisnis yang paling sering kita jumpai pada umumnya diwujudkan dalam bentuk buku saku “*peraturan perusahaan*” yang pasti dan selalu ada di masing-masing korporasi. Buku saku tersebut umumnya diberikan kepada semua elemen korporasi terutama karyawan sebagai pedoman pelaksanaan etika bisnis dalam operasional sehari-hari. Dasar dari pembuatan buku saku adalah etika bisnis sesuai hukum dan peraturan tertulis maupun normatif yang berlaku dimana umumnya banyak membahas mengenai kode etik perusahaan, peraturan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab semua elemen korporasi.

Hal ini barulah merupakan tahap awal dari praktek etika bisnis yakni mengkodifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis bersama-sama *corporate-culture* atau budaya perusahaan, kedalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari perusahaan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis. Di Indonesia sendiri, tata cara pembuatan kode etik dan peraturan perusahaan ditetapkan dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 48/MEN/V/2004 tanggal 8 April 2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan.

Dalam konteks ini dapat kita lihat bahwa pentingnya etika bisnis membuat pemerintah turut serta mewajibkan korporasi untuk mengaplikasikannya melalui pembuatan suatu pernyataan tertulis berlandaskan konsep etika bisnis. Untuk memudahkan penerapan etika bisnis dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan kedalam manajemen korporasi yakni dengan cara diantaranya menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (*code of conduct*), memperkua sistem pengawasan, menyelenggarakan pelatihan (*training*) untuk karyawan secara berkala dan sebagainya.

Untuk contoh umum aplikasi etika bisnis dalam korporasi global juga dapat dijelaskan melalui suatu studi kasus tertentu. Misalnya saja pada kasus yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia sebagai salah satu perusahaan *mine-ing* (tambang) di Indonesia dalam melaksanakan operasional bisnisnya membawa dampak tersendiri terhadap kerusakan lingkungan di sekitar wilayah operasi bisnisnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya,

sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Oleh sebab itu PT. Freeport Indonesia memiliki komitmen untuk mengelola dan meminimalisir dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan untuk mereklamasi serta menghijaukan kembali lahan yang terkena dampak. Melalui kebijakan lingkungan, PT. Freeport Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan praktik-praktik lingkungan yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup layak guna memenuhi tanggung jawab tersebut dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan pada setiap lokasi kegiatan. PT. Freeport Indonesia juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung penelitian ilmiah guna memahami lingkungan di sekitar tempat PT. Freeport Indonesia beroperasi, serta melakukan pemantauan yang komprehensif untuk menentukan efektivitas dari praktik-praktik pengelolaan.

Sikap-sikap yang dilaksanakan PT. Freeport Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas menggambarkan pengaplikasian etika bisnis dalam korporasi global. Etika bisnis terlaksana oleh PT. Freeport Indonesia melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diwujudkan dalam berbagai langkah dan sikap. Walaupun PT. Freeport Indonesia memberikan dampak perusakan lingkungan dalam operasional bisnisnya namun korporasi tersebut menjunjung tinggi etika dalam bisnisnya sehingga menimbulkan sikap tanggung jawab untuk meminimalisir dan menghilangkan dampak perusakan tersebut. Secara tidak langsung melalui pelaksanaan etika bisnis tersebut, PT. Freeport Indonesia menginginkan untuk tidak merugikan pihak manapun sehingga keberlangsungan bisnisnya dapat terus terjaga dengan baik. Dengan mengaplikasikan etika bisnis, sistem bisnis yang dijalankan akan kondusif dan terhindar dari permasalahan apapun.

Dari contoh di atas dapat kita lihat pentingnya peran etika dalam korporasi global. Aplikasi etika bisnis dinilai sangat bermanfaat menciptakan operasional bisnis lebih baik bahkan lebih menguntungkan. Etika bisnis dapat dijadikan pedoman sekaligus batasan mengenai hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Diharapkan studi mendalam mengenai etika bisnis dapat mengantarkan tidak hanya dalam skala besar seperti korporasi untuk terus maju namun juga melahirkan kesadaran pentingnya moral terhadap individu di dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Menelaah dan menganalisis lebih jauh dalam memahami etika bisnis dalam hubungan internasional dan hubungan antara korporasi global, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam dimensi korporasi global sangat menunjang dalam operasional perusahaan yang mana hal ini terlihat pada peran dan tindakan perusahaan transnasional sebagai bagian dari aktor hubungan internasional khususnya peranan non-negara dalam politik ekonomi internasional. Dengan diskursus yang dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu etika bisnis sangat menarik untuk dikembangkan dalam maata kuliah korporasi global dan mengetahui dinamika studi hubungan internasional tentunya.

Tema – tema besar perilaku perusahaan global selama ini hanya dipahami sebagai aktor non-negara yang bermain dalam dinamika perekonomian dunia, namun dengan melihat lebih jauh melalui analisis mendalam diketahui bahwa peranan dan perilaku korporasi global dalam ekonomi internasional tidaklah terlepas dari dinamika politik internasional yang mempengaruhinya, ada lobi - lobi antara perusahaan dengan individu maupun pemerintah dalam operasional mereka, sehingga kajian etika bisnis sangat relevan ketika di tinjau lebih jauh dalam mata kuliah korporasi global.

Daftar Pustaka

Buku

- Carl McDaniels dan Lawrence J. Gitman, t.t. *The Future of Business*. Mason: Thomson South West.
- Dricklova, Eva dan Vladislav Kaputa. 2006. *Doing fair and Responsible Business: The Concept of Business Ethic in Slovakia*. The System of Modern Poverty.
- Edi Suharto, 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Eric M. Rovie. 2009. Review of “Ethics and International Relations, Second edition”. Agness scott college. Essays in Philosophy. Blacwell Publishing.
- Jamess brasset and Dan Bulley. 2007. Ethic in world politics: Cosmopolitanis and beyond. UK. Centre for globalisatioan and regionalization, university of warwick.
- Judith Irwin, 2012. “Doing Business in China: An overview of ethical aspects”, dalam *Occasional Paper 6, July 2012*. London: Institute of Business Ethics.
- Nathan E. Hurst. 2004. Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility: Comparing European Business Practices to those in the United States. SPRING.
- Susanne Soederberg, 2006. *Global Governance in Question: Empire, Class, and the New Common-Sense in Managing North-South Relations*. London: Pluto Press.
- Velasqes G. Emanuel. 2002. Etika Bisnis: Konsep dan kasus edisi 5. Andi Yogyakarta.
- Venugupalan, Dr K, dkk. 2011. *Management Concepts and Business Ethics*. Kerala: University of Callicut.

Jurnal

- Barbara Ley Toffler, 2001. “Ethics in the New Millennium”, dalam *International Business Ethics Review Volume 4, Issue 1, Spring 2001*.